

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA MISKIN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI PROPINSI JAWA BARAT

(Policy and Strategy for Income and Food Security Improvement of Rural and Urban Poor Household in West Java Province)

Alla Asmara, M. Parulian Hutagaol¹⁾, Ibrahim Isytar²⁾

¹⁾Dep. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen-IPB

²⁾Jurusan Sosial Ekonomi, Faperta Univ. Tanjungpura

ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini sejak diterpa krisis moneter pada tahun 1997. Di Provinsi Jawa Barat, populasi penduduk miskin bahkan cenderung semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah karakteristik sosial ekonomi dan kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan di provinsi ini. Penelitian dirancang sebagai suatu penelitian survey dengan metode penarikan sampelnya adalah *simple random sampling*. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga miskin perdesaan relatif tidak berbeda dengan rumah tangga miskin perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sekitar 35 persen rumah tangga miskin yang membelanjakan sebagian besar (60 persen) pendapatannya untuk makanan. Kelompok ini adalah kelompok yang paling rentan terhadap kelaparan.

Kata kunci : Rumah tangga miskin perdesaan, rumah tangga miskin perkotaan, ketahanan pangan.

ABSTRACT

Poverty has become a serious problem in this country since the emergence of exchange rate crisis in 1997. In West Java Province, population of poor people becomes even increasing over the last few years. This study aims at evaluating socio-economic characteristics of poor families and situation of food security of rural and urban poor families in this province. The study is designed as research survey with simple random sampling. For analyzing data used descriptive analysis, qualitative and quantitative. The study finds there is no different in socio-economic characteristics between rural poor families and urban poor families. The result of study shows about 35 percent of poor household spend a very high portion of income (60 per cent) on food expenditure. This group is one the most vulnerable to starvation.

Keywords : Urban poor families, rural poor families, food security.

PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan di Propinsi Jawa Barat secara umum menunjukkan kecenderungan semakin memburuk beberapa tahun terakhir ini, seperti yang ditunjukkan oleh data berikut. BPS Jawa Barat (2007) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi ini meningkat dari 4.654,20 ribu jiwa menjadi

5.455,20 ribu jiwa selama periode 2004-2007. Populasi penduduk miskin meningkat baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pada periode tersebut, populasi masyarakat miskin di daerah perdesaan meningkat dari 2.411,00 ribu jiwa menjadi 2.800,7 ribu jiwa, sedang populasi penduduk miskin perkotaan meningkat dari 2.243,20 ribu jiwa menjadi 2.654,50 ribu jiwa.

Menurut Sumodinigrat (1999) kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang membuatnya tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Dalam realitas, kesulitan hidup yang dihadapi oleh penduduk miskin tersebut sering diperburuk oleh gejolak harga pasar. Karena pendapatan yang sangat terbatas, terjadinya peningkatan harga-harga kebutuhan pokok, seperti beras dan bahan bakar dapat membuat masyarakat miskin menderita kelaparan. Singkatnya, penduduk miskin sangat rentan terhadap kelaparan.

Fenomena bahwa populasi penduduk miskin yang semakin meningkat di Jawa Barat beberapa tahun terakhir ini dapat dimaknai sebagai fenomena mengenai semakin banyak penduduk yang menghadapi kerawanan pangan di provinsi tersebut. Kondisi ini sangat paradoksial mengingat fakta bahwa Jawa Barat adalah produsen utama beras nasional yang selalu mengekspor beras produksinya ke provinsi-provinsi lain yang kekurangan beras.

Kondisi yang paradoksial ini menyadarkan kita bahwa konsep ketahanan pangan yang bertumpu pada paradigma ketersediaan-penyediaan (*supply-availability paradigm*) sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi. Maxwell and Slater (2003) mencatat bahwa wacana mengenai ketahanan pangan berubah sedemikian cepat dari fokus pada ketersediaan-penyediaan (*supply & availability*) ke perspektif hak dan akses (*entitlements*). Dalam paradigma baru yang diperkenalkan oleh pemenang Nobel Ekonomi Amartya Sen ini, akses kepada pangan dimaknai sebagai hak azasi setiap penduduk. Implikasinya adalah negara mempunyai tanggung-jawab untuk menjamin kecukupan pangan bagi warganya, termasuk penduduk miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Raskin oleh pemerintah Indonesia dapat dipandang sebagai manifestasi dari tanggung-jawab tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi dan menganalisis kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan di Propinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Barat. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat relatif banyak. Lebih lanjut dipilih dua kabupaten menjadi lokasi penelitian. Pada setiap kabupaten dipilih dua kecamatan dan dari setiap kecamatan dipilih satu desa dan satu kelurahan berdasarkan tingginya persentase kemiskinan. Dengan demikian wilayah sampel mencakup empat desa (mewakili wilayah perdesaan) dan empat kelurahan (mewakili wilayah perkotaan). Berdasarkan pertimbangan tersebut dua kabupaten yang dipilih menjadi lokasi studi adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang. Adapun waktu penelitian selama 6 bulan, yaitu Juli-Desember 2009.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi: karakteristik RTM, pendapatan dan pola pengeluaran RTM. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dengan instrumen berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin penerima Raskin. Pemilihan rumah tangga sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Pada setiap desa/kelurahan dipilih 20 RTM. Dengan demikian total RTM yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 160 unit, sampel masing-masing wilayah (perdesaan dan perkotaan) 80 unit. Distribusi sampel ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Rumah Tangga Contoh

Wilayah	Jumlah Responden
a. Wilayah Perdesaan	80
Desa Gunung Sari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor	20
Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor	20
Desa Ranca Mulya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang	20
Desa Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang	20
b. Wilayah Perkotaan	80
Kelurahan Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor	20
Kelurahan Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor	20
Kelurahan Kota Kaler, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang	20
Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang	20
TOTAL	160

Analisis Data**Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin akan digambarkan secara deskriptif naratif. Deskripsi kondisi sosial ekonomi dari rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan meliputi karakteristik rumah tangga (jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga yang bekerja); dan kondisi ekonomi rumah tangga (pendapatan dan pengeluaran).

Analisis Ketahanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan RTM adalah pangsa pengeluaran pangan rumah tangga. Suhardjo (1996) dan Azwar (2004) menjelaskan bahwa pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran pangan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Hal ini bertolak dari teori Engel yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, semakin rendah pangsa pendapatannya yang dibelanjakan untuk konsumsi pangan (Nicholson, 1997). Dengan perkataan lain, semakin miskin suatu keluarga semakin besar pangsa pendapatannya yang dibelanjakan untuk konsumsi pangan. Padahal, semakin miskin suatu keluarga, semakin rentan

keluarga tersebut terhadap kerawanan pangan. Dengan demikian, pangsa pendapatan untuk belanja pangan dapat digunakan sebagai indikator ketahanan pangan suatu keluarga. Formulasi untuk mengukur pangsa pengeluaran pangan adalah:

$$PP = \frac{EP}{TP} \times 100 \% \dots\dots\dots$$

(1)

dimana:

PP = pangsa pengeluaran pangan (%).

EP = pengeluaran RTM untuk pangan (Rp/bulan).

TP = total pengeluaran RTM (Rp/bulan).

Analisis terhadap tingkat ketahanan pangan RTM juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan antara tingkat kebutuhan energi normatif dengan konsumsi riil rumah tangga untuk pangan pokok (beras). Kebutuhan normatif terhadap beras didasarkan atas Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 100 kg/kapita/tahun. Formulasi tingkat konsumsi beras RTM adalah:

$$IKB = \frac{KBR}{KBN} \times 100 \% \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

IKB = indeks konsumsi beras RTM (%).

KBR = konsumsi riil rumah tangga terhadap beras (Kg/kapita/tahun).

KBN = kebutuhan normatif terhadap beras (Kg/kapita/tahun).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pokok Rumah Tangga Miskin

Mayoritas kepala keluarga dari rumah tangga miskin berada pada usia produktif (Tabel 2). Apabila dilihat secara keseluruhan di Jawa Barat, 56,3 persen kepala keluarga di perdesaan dan 66,3 persen di perkotaan masuk dalam kategori usia produktif dengan umur rata-rata kepala keluarga masing-masing 51,9 tahun dan 52,5 tahun. Pola serupa juga dijumpai di kabupaten lokasi studi.

Sebagian besar kepala keluarga di perdesaan (80,0 persen) dan perkotaan (62,5 persen) mempunyai pendidikan formal yang relative rendah (yaitu lulus SD atau lebih rendah) dengan rata-rata pendidikan formal yang mampu ditempuh masing-masing 4,9 tahun dan 6,6 tahun. Kondisi tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Kabupaten Bogor relative lebih buruk dibandingkan Kabupaten Sumedang (Tabel 2).

Secara rata-rata ukuran rumah tangga miskin di Jawa Barat relatif tidak besar yaitu 4 orang per rumah tangga untuk perdesaan dan 5 orang per rumah tangga untuk perkotaan. Sementara itu, sebanyak 35,6 persen rumah tangga menyatakan memiliki anak yang putus sekolah. Keberadaan anak putus sekolah masih terbilang cukup besar baik di perdesaan maupun di perkotaan, yaitu masing-masing sebanyak 38,8 persen dan 32,5 persen (Tabel 2).

Tabel 2. Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Propinsi Jawa Barat

Karakteristik Rumah Tangga	Sumedang			Bogor			Jawa Barat		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
1) Umur Kepala Rumah Tangga (th)									
a. < 30	5.0	2.5	3.8	0.0	0.0	0.0	2.5	1.3	1.9
b. 30 – 55	57.5	67.5	62.5	50.0	62.5	56.3	53.8	65.0	59.4
c. > 55	37.5	30.0	33.8	50.0	37.5	43.8	43.8	33.8	38.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	48.3	50.1	49.2	55.4	54.9	55.2	51.9	52.5	52.2
2) Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga (th)									
a. 0	2.5	7.5	5.0	42.5	12.5	27.5	22.5	10.0	16.3
b. 1-6	65.0	45.0	55.0	50.0	60.0	55.0	57.5	52.5	55.0
c. 7-9	22.5	22.5	22.5	5.0	20.0	12.5	13.8	21.3	17.5
d. 10-12	10.0	25.0	17.5	2.5	7.5	5.0	6.3	16.3	11.3
e. > 12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	6.7	7.3	7.0	3.0	6.0	4.5	4.9	6.6	5.7
3) Jumlah Anggota Rumah Tangga									
a. 1-4	55.0	40.0	47.5	45.0	30.0	37.5	50.0	35.0	42.5
b. > 4	45.0	60.0	52.5	55.0	70.0	62.5	50.0	65.0	57.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	4.4	5.0	4.7	4.6	5.3	5.0	4.0	5.0	4.8
4) Keberadaan anak putus sekolah									
a. Ada	15.0	22.5	18.8	62.5	42.5	52.5	38.8	32.5	35.6
b. Tidak Ada	85.0	77.5	81.3	37.5	57.5	47.5	61.3	67.5	64.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : data primer, diolah

Karakteristik Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa pendapatan RTM yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih besar dibandingkan yang tinggal di perdesaan. Rata-rata pendapatan total masing-masing RTM di perdesaan dan perkotaan adalah Rp 630.529/bulan dan Rp 706.956/bulan. Pola serupa juga dijumpai di dua kabupaten sampel (Tabel 3).

Sejalan dengan tingkat pendapatan, besarnya pengeluaran RTM yang tinggal di wilayah perkotaan juga cenderung lebih tinggi dibandingkan RTM yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal tersebut berlaku baik untuk pengeluaran pangan ataupun non-pangan. Untuk pengeluaran pangan, rata-rata pengeluaran RTM di Jawa Barat pada wilayah perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah sebesar Rp 359.561 dan Rp 409.990 per bulan. Adapun untuk pengeluaran non-pangan, rata-rata pengeluaran RTM pada wilayah perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah sebesar Rp 380.581/bulan dan Rp 436.445/bulan (Tabel 3).

Tabel 3. Distribusi RTM berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Pengeluaran

Uraian	Sumedang (%)			Bogor (%)			Jawa Barat (%)		
	Pedesaan	Perkotaan	Total	Pedesaan	Perkotaan	Total	Pedesaan	Perkotaan	Total
1. Pendapatan RT Total Perbulan (Rp)									
a. <268577	17.5	17.5	17.5	2.5	2.5	2.5	10.0	10.0	10.0
b. 268577-10689088	72.5	72.5	72.5	87.5	82.5	85.0	80.0	77.5	78.8
c. >1068908	10.0	10.0	10.0	10.0	15.0	12.5	10.0	12.5	11.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	568089.6	575026.0	571557.8	692968.8	838885.4	765927.1	630529.2	706955.7	668742.4
2. Pengeluaran RT Perbulan Pangan (Rp)									
a. <149252	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.5	7.5
b. 149252-620299	85.0	80.0	82.5	85.0	70.0	77.5	85.0	75.0	80.0
c. > 620299	0.0	5.0	2.5	15.0	30.0	22.5	7.5	17.5	12.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	254520.0	295233.1	274876.6	464601.7	524746.7	494674.3	359560.9	409989.9	3847754
Non Pangan(Rp)									
a. <53904	10.0	7.5	8.8	5.0	0.0	2.5	7.5	3.8	5.6
b. 53904-763122	80.0	87.5	83.8	90.0	90.0	90.0	85.0	88.8	86.9
c. >763122	10.0	5.0	7.5	5.0	10.0	7.5	7.5	7.5	7.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rata-rata	390711.3	405060.4	397885.8	370451.3	467829.2	419140.2	380581.3	436444.8	408513.0

Kondisi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin

Ilham dan Sinaga (2009) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa pangsa pengeluaran pangan layak dijadikan indikator ketahanan pangan karena mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai ukuran ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi, keanekaragaman pangan, dan pendapatan. Dalam kajian ini, analisis terhadap kondisi ketahanan pangan juga menggunakan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator ketahanan pangan dari rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap rumah tangga miskin di Jawa Barat diketahui bahwa terdapat sebanyak 35,6 persen rumah tangga miskin di wilayah Jawa Barat yang proporsi pengeluaran pangannya lebih dari 60 persen (Tabel 4). Temuan ini mengindikasikan bahwa sejumlah rumah tangga tersebut diduga menghadapi kondisi ketidaktahanan pangan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin lainnya.

Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Pangsa Pengeluaran Pangan

Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga	Sumedang			Bogor			Jawa Barat		
	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total	Desa	Kota	Total
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
< 40 persen	30.0	47.5	38.8	15.0	20.0	17.5	22.5	33.8	28.1
40 - 60 persen	37.5	27.5	32.5	37.5	42.5	40.0	37.5	35.0	36.3
> 60 persen	32.5	25.0	28.8	47.5	37.5	42.5	40.0	31.3	35.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : data primer, diolah.

Apabila dikaji berdasarkan wilayah diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin yang terindikasi menghadapi kondisi ketidaktahanan pangan relative lebih besar berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan (Tabel 4). Untuk wilayah perdesaan di Jawa Barat terdapat 40,0 persen rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 60 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 31,3 persen rumah tangga. Hasil serupa juga terjadi di dua kabupaten yang menjadi lokasi studi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sekalipun di wilayah perdesaan usaha pertanian menjadi salah satu usaha utama yang berkembang di masyarakat tetapi ternyata bagi rumah tangga miskin hal tersebut tidak membuat kondisi ketahanan pangan rumah tangganya lebih baik

dibandingkan yang berada di perkotaan. Hal tersebut diduga disebabkan kemampuan rumah tangga miskin pedesaan lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin perkotaan dalam mengakses pangan. Keterbatasan dalam akses pangan tersebut terkait dengan daya beli, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu diketahui bahwa tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga miskin pedesaan (Rp 630.529/bulan) relative lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin perkotaan (Rp 706.956/bulan).

Apabila dikaji di dua lokasi sampel, diketahui bahwa proporsi rumah tangga dengan pangsa pengeluaran lebih dari 60 persen lebih banyak terdapat di Kabupaten Bogor dibandingkan Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Bogor terdapat 42,5 persen rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih dari 60 persen, sedangkan di Kabupaten Sumedang terdapat 28,8 persen rumah tangga. Hal ini diduga terkait biaya hidup di Kabupaten Bogor yang relative lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Sumedang.

Lebih lanjut untuk tingkat konsumsi beras yang merupakan pangan utama ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa tingkat konsumsi rumah tangga miskin terhadap beras relative tinggi. Jumlah rata-rata beras yang dikonsumsi rumah tangga miskin berkisar 36,7 – 47,9 kg/bulan dengan konsumsi per kapita berkisar antara 9,2 – 11,6 kg/bulan. Apabila dibandingkan dengan norma Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu 100 kg/kapita/tahun, ternyata bahwa konsumsi rumah tangga miskin pedesaan dan perkotaan melebihi norma tersebut. Temuan ini tidak bermakna bahwa rumah tangga miskin di Propinsi Jawa Barat tidak menghadapi masalah dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Temuan tersebut diduga kuat lebih menunjukan bahwa rumah tangga miskin menjadikan beras sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan energi. Sementara itu, rendahnya daya beli rumah tangga miskin menjadi pembatas untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya.

Tabel 5. Rataan Tingkat Konsumsi Beras Rumah Tangga Miskin

Uraian	Sumedang		Bogor		Jawa Barat	
	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (kg/RTM/bln)	36.7	41.9	47.9	46.2	42.3	44.0
Konsumsi per Kapita (kg/kap/bln)	9.7	9.2	11.6	9.2	10.6	9.2
Indeks Konsumsi Beras RTM (persen)	116.8	110.4	139.2	110.4	127.2	110.4

Sumber : data primer, diolah.

Apabila dikaji berdasarkan wilayah diketahui bahwa rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah perdesaan cenderung memiliki tingkat konsumsi beras per kapita yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan masyarakat miskin di perdesaan terhadap beras relative lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan. Hal tersebut diduga karena perbedaan dalam pola konsumsi masyarakat di kedua wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa karakteristik rumah tangga miskin perdesaan dan perkotaan relatif tidak berbeda. Secara umum kepala rumah tangga miskin baik di perdesaan maupun perkotaan berada pada usia produktif (kurang dari 55 tahun) dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak sekolah atau hanya sekolah dasar. Jumlah anggota rumah tangga umumnya berkisar antara 4-5 orang dan sekitar 35 persen rumah tangga memiliki anak putus sekolah. Tingkat pendapatan rata-rata RTM di wilayah perdesaan relatif lebih kecil dibandingkan perkotaan. Kondisi serupa juga dijumpai pada pengeluaran rumah tangga miskin, baik pengeluaran pangan ataupun non-pangan.

Terdapat sekitar 35 persen rumah tangga miskin di Propinsi Jawa Barat memiliki pangsa pengeluaran pangan lebih dari 60 persen. Sejumlah rumah tangga tersebut diduga menghadapi kondisi ketidaktahanan pangan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga miskin lainnya. Hal lain yang juga dapat disimpulkan adalah rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah perdesaan cenderung memiliki tingkat konsumsi beras per kapita yang lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di perkotaan.

Berdasarkan kesimpulan, saran yang diberikan adalah: (1) Untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras maka program diversifikasi pangan perlu lebih dioptimalkan, bukan hanya pada sisi produksi tetapi juga sisi konsumsi. Ketersediaan bahan pangan yang beragam dan dengan tingkat harga yang relatif murah akan mendorong konsumsi pangan tidak hanya bergantung pada beras. (2) Untuk meningkatkan akses pangan bagi rumah tangga miskin maka upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong kenaikan tingkat pendapatan rumah tangga. Untuk itu, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. 2004. Aspek Kesehatan dan Gizi dalam Ketahanan Pangan. *Dalam: Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII "Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi"*. BPS, Departemen Kesehatan, Badan POM, Bappenas, Departemen Pertanian dan Ristek, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2007. Berita Resmi Statistik: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2007. BPS Jawa Barat. Bandung.
- Ilham, N dan Sinaga, B.M. 2009. Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan Sebagai Indikator Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor.
- Maxwell S. and Slater, R. 2003. Food Policy Old and New. Development Policy Review, Vol. 21(5-6).
- Nicholson, W. 1997. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. *7th Edition*. The Dryden Press, Harcourt Brace College Publisher.
- Suhardjo. 1996. Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 20 – 30 Mei 1996, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, G. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan. IMPAC, Jakarta.
- Todaro, M.P. 1989. *Economic Development in the Third World, 4 th ed*: New York: Longman.